

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia pada masa sekarang sedang dihadapkan dengan era globalisasi yang semakin cepat perkembangannya terutama di bidang ekonomi, budaya, dan politik. Dan hal ini mendorong munculnya persaingan-persaingan antar Bangsa dan Negara. Secara nyata, banyak bermunculan pasar-pasar bebas. Hal ini menyebabkan masing-masing Negara semakin mengupayakan berbagai macam cara untuk dapat bersaing di pasar bebas ini. Di Indonesia sendiri juga semakin bertambah pesat berkembangnya di dunia industrinya.

Berdirinya sebuah perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas. Ada beberapa hal yang mengemukakan tujuan berdirinya sebuah perusahaan. Tujuan yang pertama adalah untuk mencapai keuntungan maksimal. Tujuan yang kedua adalah ingin memakmurkan pemilik perusahaan atau para pemilik saham. Sedangkan tujuan perusahaan yang ketiga adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya. Ketiga tujuan perusahaan tersebut sebenarnya secara substansial tidak banyak berbeda. Hanya saja penekanan yang ingin dicapai oleh masing-masing perusahaan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya (Harjito dan Martono, 2005 dalam alfredo Mahendra DJ (2011:1).

Berkembangnya bisnis dalam bentuk perdagangan saham di pasar modal menjadikan informasi tentang kondisi perusahaan public (emiten) sangat berharga bagi para investor maupun calon investor. Setiap informasi yang relevan tentang emiten, dengan cepat (instant) diserap oleh pasar dan dengan cepat pula pasar

mengekspresikannya dalam bentuk harga atau perubahan harga saham. Dalam mekanisme tersebut para investor mengharapkan return (keuntungan) dari saham yang telah atau akan dikuasai, oleh sebab itu pengambilan keputusan yang akan diambil berdasarkan pada pemilihan investasi yang efisien. Informasi tentang perusahaan public (emiten) sangat berharga bagi para investor salah satunya adalah informasi tentang struktur modal dan nilai perusahaan dalam satu periode atau waktu tertentu yang merupakan bentuk informasi fundamental. Para investor menggunakan informasi tersebut sebagai dasar penilaian harga (return) saham, keputusan membeli atau menjual saham (Handayani, 2008:100).

Bisnis yang dipandu oleh spiritualitas dan etika akan menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan dengan terwujudnya disiplin pasar yang lahir dari budaya governance bisnis yang baik. Menurut Hamdani (2016:1) Good Corporate Governance (GCG) bukanlah istilah baru, melainkan konsep lama yang kembali populer karena adanya perkembangan sosial dan kemajuan praktik bisnis. Di Amerika GCG muncul sekitar tahun 1970-an. Istilah ini muncul ketika terbongkarnya skandal kecurangan yang melibatkan perusahaan besar seperti : Enron, Worldcom, Tyco, London & Commonwealth, Poly Peck, Maxwel dan perusahaan besar lainnya. Kasus kecurangan ini melibatkan manajemen puncak yang berlangsung cukup lama karena lemahnya corporate boards.

GCG di kawasan Asia mulai dibicarakan sekitar akhir 1990-an, pasca terjadinya krisis ekonomi yang melanda negara-negara di kawasan Asia. Sementara GCG di Indonesia dimulai pada pertengahan 1997, memuncak pada saat krisis ekonomi melanda. Disinyalir terjadinya krisis ekonomi di Indonesia terjadi sebagai

akibat lemahnya implementasi GCG dan etika yang melandasinya. Praktik pelanggaran GCG dilakukan oleh perusahaan besar di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia seperti : Kimia Farma, Kereta Api, Lippo Bank, dan PLN. Realitas seperti ini menandakan belum efektifnya pelaksanaan GCG di Indonesia. Pelaksanaan corporate governance di Indonesia tergolong masih sangat rendah, hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya memiliki corporate culture sebagai inti dari corporate governance. Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporat belum dikelola dengan benar dan belum menjalankan governansi.

Implementasi GCG di Indonesia sampai saat ini masih belum memenuhi harapan semua pihak. Meskipun kampanye penegakkan corporate governance terus dilancarkan melalui pembentukan struktur corporate governance (Komisaris independen, komite audit, komite remunerasi, komite resiko, corporate secretary) maupun pedoman best practice dan code of conduct dewan direksi dan dewan komisaris. GCG semakin penting dalam praktik bisnis di Indonesia. Oleh karena itu penerapan GCG memerlukan komitmen yang kuat untuk mewujudkannya. Implementasi di Indonesia masih menghadapi kendala yang luar biasa. Sehingga sampai saat ini GCG belum memberikan solusi tata kelola yang baik. Hingga akhirnya Indonesia menghadapi realitas yang tidak terbantahkan apabila diperbandingkan dengan Negara-negara di kawasan Asia lainnya. Disampaikan pada diskusi panel Universitas Trisakti bersama OJK oleh Wulandari (2014) bahwa realitas terkait dengan implementasi GCG di Indonesia menunjukkan hasil

assessment terhadap corporate governance Indonesia yang belum memuaskan dan upaya perbaikan corporate governance belum dilakukan secara komprehensif.

Penerapan GCG di Indonesia melemah dikarenakan karakteristik yang berbeda-beda antara lain: (1) kepemilikan perusahaan terkonsentrasi pada individu atau keluarga, sehingga pihak ini mempunyai pengaruh kuat untuk menentukan arah perusahaan. Akibatnya problem keagenan (the agency problem) lebih terarah pada benturan kepentingan antara pemilik mayoritas ini dengan pemilik minoritas. Secara umum pemilik saham minoritas selalu berada pada posisi yang lemah. (2) Perusahaan publik di Indonesia pada umumnya mempunyai tingkat hutang yang sangat besar dan sebagian besar dalam bentuk mata uang asing yang tidak dilindungi-nilaikan (un-hedge), sehingga sangat rentan terhadap perubahan kondisi perekonomian. Pada beberapa kasus, dana pinjaman yang diperoleh dialokasikan pada kegiatan investasi lainnya yang tidak produktif, sehingga menurunkan nilai perusahaan. (3) Lemahnya penegakan hukum dan lembaga pendukungnya di dalam menjaga berjalannya sistem secara benar, sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan. Kondisi ini semakin melemah pemilik minoritas namun, sebaliknya, akan memperkuat posisi pemilik saham mayoritas untuk mengeksploitasi sumber daya perusahaan untuk kepentingannya, namun merugikan kepentingan pihak lainnya (terutama pemegang saham minoritas).

Kendala penerapan GCG di Indonesia dibagi kedalam tiga bagian (Hamdani, 2016:123), yaitu kendala internal, kendala eksternal dan kendala yang berasal dari struktur kepemilikan. (1) Kendala internal meliputi kurangnya komitmen dari pimpinan dan karyawan perusahaan, rendahnya tingkat pemahaman dari pimpinan

dan karyawan perusahaan tentang prinsip-prinsip good corporate governance, kurangnya panutan atau teladan yang diberikan oleh pimpinan, belum adanya budaya perusahaan yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip good corporate governance, serta belum efektifnya sistem pengendalian internal (Djarmiko, 2004).

(2) Kendala eksternal, dalam pelaksanaan corporate governance terkait dengan perangkat hukum (law-enforcement). Secara implisit ketentuan-ketentuan mengenai GCG telah ada tersebar dalam UUPT, Undang-undang dan peraturan perbankan, Undang-undang Pasar Modal dan lain-lain. Namun penegakannya oleh pemegang otoritas, seperti Bank Indonesia, Bapepam, BPPN, Kementerian Keuangan, BUMN, bahkan pengadilan sangat lemah. (3) Kendala yang berasal dari struktur kepemilikan, berdasarkan presentasi kepemilikan dalam saham, kepemilikan terhadap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepemilikan yang terkonsentrasi dan kepemilikan yang menyebar. Kepemilikan yang terkonsentrasi akan di dominasi oleh seseorang atau sekelompok orang saja (40,00% atau lebih). Kepemilikan yang menyebar terjadi pada saat suatu perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang banyak dengan jumlah saham yang kecil-kecil (satu pemegang saham hanya memiliki saham sebesar 5% atau kurang). Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh struktur kepemilikan adalah perusahaan tidak dapat mewujudkan prinsip keadilan dengan baik karena pemegang saham yang terkonsentrasi pada seseorang atau sekelompok orang dapat menggunakan sumber daya perusahaan secara dominan sehingga dapat mengurangi nilai perusahaan.

Memahami dasar-dasar teori struktur modal sangatlah penting, karena pemilihan bauran pendanaan (financial mix) merupakan inti strategis bisnis secara keseluruhan. Struktur Modal adalah bauran sumber pendanaan permanen (jangka panjang) yang digunakan perusahaan. Tujuan manajemen struktur modal adalah menciptakan sumber dana permanen sedemikian rupa agar mampu memaksimalkan nilai perusahaan tercapai. Struktur Modal perusahaan merupakan salah satu faktor fundamental dalam operasi perusahaan. Struktur modal suatu perusahaan ditentukan oleh kebijakan pembelanjaan (financing policy) dari manajer keuangan yang senantiasa dihadapkan pada pertimbangan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang mencakup tiga unsur penting, yaitu: pertama, keharusan untuk membayar balas jasa atas penggunaan modal kepada pihak yang menyediakan dana tersebut, atau sifat keharusan untuk pembayaran biaya modal. Kedua, sampai seberapa jauh kewenangan dan campur tangan pihak penyedia dana itu dalam mengelola perusahaan. Ketiga, resiko yang dihadapi perusahaan (Safrida, 2008:1).

Penelitian mengenai struktur modal yang mempengaruhi nilai perusahaan telah banyak dilakukan di Indonesia. Beberapa penelitian tersebut diantaranya: Sri Ayu dan Wirajaya (2013:368) menemukan bukti bahwa struktur modal mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, yang memberi arti bahwa jika kebijaksanaan struktur modal perusahaan lebih banyak menggunakan hutang maka akan terjadi kenaikan harga saham, sedangkan pertumbuhan perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Irham Fahmi:2011). Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu.

Profitabilitas disini adalah tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Semakin besar keuntungan yang diperoleh semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayarkan devidennya. Semakin besar deviden yang dibagi akan semakin tinggi nilai perusahaan (tax differential theory). Disamping itu profit yang tinggi memberikan indikasi prospek perusahaan yang baik sehingga dapat memicu investor untuk ikut meningkatkan permintaan saham. Permintaan saham yang naik menyebabkan nilai perusahaan meningkat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memberi judul **“Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Struktur Modal dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2016 ”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2016?
2. Bagaimana pengaruh Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2016?
3. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2016?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2016.



3. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2016.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh beberapa manfaat yang antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu akuntansi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan *Good Corporate Governance*, Struktur Modal dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan serta mengaplikasikan teori penelitian mengenai *Good Corporate Governance*, Struktur Modal dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan.

###### b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu akuntansi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan referensi untuk penelitian-

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan profitabilitas, *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Nilai Perusahaan.

c. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terkait dengan permasalahan mengenai *Good Corporate Governance*, Struktur Modal dan Kinerja Keuangan terhadap nilai perusahaan serta sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja manajemen di masa yang akan datang.

d. Bagi Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan dengan dilihat penerapan *Good Corporate Governance* sehingga dapat mengambil keputusan investasi yang tepat serta pengambilan keputusan dalam investasi saham.